

Aksi Damai Diam Hitam Kamisan di Depan Istana ke 43
JSKK (Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban)
Jl. Bonang 1 A Menteng Jakarta Pusat – 12870, telp 021 3913473

No. : 17/Surat Terbuka_JSKK/XI/07

Hal : **Penuntasan kasus pelanggaran HAM (Kasus Lumpur Lapindo)**
Permohonan Audiensi korban pelanggaran HAM

Kepada Yth.
Bapak Presiden Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono
di Istana Merdeka

Dengan hormat,

Hari ini di aksi kamisan ke 43, kami para Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM; peristiwa tragedi kemanusiaan 1965, Tanjung Priok 1984, Talangsari Lampung 1989, DOM Aceh, Papua, Mei 1998, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Penculikan Aktivis Pro Demokrasi, pembunuhan Munir, kembali datang ke depan Istana Negara RI dengan payung dan atribut serba hitam, lambang keteguhan dan keprihatinan atas impunitas yang terjadi dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Hari ini kami berdiri di depan Istana bersama dengan para korban lumpur Lapindo Jawa Timur. Sebuah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan korporasi dan dilindungi oleh Negara. Sampai saat ini nasib korban Lapindo tidak juga menentu. Pemberlakuan Perpres No.14/2007 sebagai dasar hukum penyelesaian masalah kerugian korban lumpur Lapindo tidak memberikan jalan keluar yang adil. Yang terjadi sebaliknya, hak korban untuk menentukan nasibnya sendiri dikediri oleh Perpers tersebut. Ketentuan tentang luas peta terdampak dan pembayaran ganti rugi ditentukan tanpa partisipasi korban. Berbagai upaya yang dilakukan korban untuk mendapat penyelesaian yang adil tidak juga menggerakkan hati pemerintah, pasalnya keberpihakan lebih diberikan bagi kepentingan korporasi pelanggar HAM.

Melalui aksi kamisan ke 43 ini, kami para korban pelanggaran HAM meminta Bapak Presiden mengambil tindakan yang adil dalam penyelesaian lumpur Lapindo, dengan mengutamakan kepentingan dan harapan para korban. Serta segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM baik di masa lalu, masa kini. sebab jika tidak, pelanggaran HAM akan terus terulang di negeri ini. Dan penting bagi Bapak Presiden untuk segera menerima permohonan audiensi para korban pelanggaran HAM jika Bapak ingin peduli pada harapan dan tuntutan korban.

Demikian surat kami yang ke 17 ini kami sampaikan, Terimakasih.

Jakarta, 29 November 2007
Presidium JSKK,

Sumarsih

Suciwati Munir

Bedjo Untung

